

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KOMITE DALAM UPAYA DUKUNGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA MAN 1 PADANG

Irwan, Yahya

Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Padang, Indonesia

haji.irwan1977@gmail.com, yahyatambunan@fip.unp.ac.id

Abstract: *This study uses a qualitative approach. Methods of data collection, the authors use interviews, observation, and documentation. As for the analysis, the author uses a qualitative descriptive analysis technique, namely in the form of written or oral data from the observed people and behavior so that in this case the author seeks to conduct research that is comprehensively describing the actual situation. In addition, the validity of the data is checked using triangulation techniques, using reference materials, and member checks. The results of this study indicate that: First, education financing at MAN 1 PADANG is said to be quite good, it can be seen in terms of input, process, and output. Second, the support of the school committee in improving the quality of education at MAN 1 PADANG, including: 1) as an advisory agency: The MAN 1 PADANG committee as a partner of the principal has given its considerations in every plan and program that has been prepared by the school. 2) as a supporting agency, the school committee as a supporting body for efforts to improve the quality of education, especially education at MAN 1 PADANG, can be in the form of financial support, energy, and thought support. For example, the committee helps and supports school facilities and infrastructure. 3) as the controlling agency, the school committee at MAN 1 PADANG controls or supervises the principal's decision-making or education planning in schools, especially in financing programs. 4) as a mediator (executive) the school committee as a liaison or mediator between the government, school parents and the community. The implications of this research are: 1) So that the school committee is more supportive in improving the quality of education at MAN 1 PADANG, 2) The support of the school committee must be further optimized, including in supervising the use of finance or transparency in the use of education fund allocations so that they are more accountable, 3) The school committee and the school itself are expected to be able to find new breakthroughs that can explore and generate funds to support the success of the education quality improvement program.*

Keywords: *Committee Fund, Education Financing, Effectiveness.*

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Selain itu keabsahan datanya di cek menggunakan teknik triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan member check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pembiayaan pendidikan di MAN 1 PADANG dikatakan cukup baik, itu dapat dilihat dari segi input, proses, dan outputnya. Kedua, dukungan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 PADANG, meliputi:

1) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*): Komite MAN 1 PADANG sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah. 2) sebagai pendukung (*supporting agency*) komite sekolah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan di MAN 1 PADANG, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite ikut membantu dan menunjang sarana dan prasarana sekolah. 3) sebagai pengontrol (*controlling agency*) komite sekolah di MAN 1 PADANG melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah khususnya dalam program pembiayaan. 4) sebagai mediator (*executive*) komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) Agar komite sekolah lebih mendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 PADANG, 2) Dukungan komite sekolah harus lebih dioptimalkan lagi, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan atau transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan agar lebih dapat dipertanggung jawabkan, 3) Komite sekolah dan pihak sekolah sendiri diharapkan dapat mencari terobosan baru yang dapat menggali dan menghasilkan dana untuk menunjang keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Dana Komite, Pembiayaan Pendidikan, Efektivitas.

Pendahuluan

Biaya pendidikan menjadi hal yang esensial saat mengikuti proses penerimaan peserta didik baru. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatur pengelolaan biaya pendidikan melalui Komite Sekolah. Komite ini ditunjuk untuk melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan, yang berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, dan bukan pungutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, bantuan pendidikan (bantuan) merupakan pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sedangkan, sumbangan didefinisikan sebagai pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Penggalangan biaya pendidikan berbentuk bantuan dan sumbangan dapat diperbolehkan. Hasil penggalangan dana tersebut dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, dan pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Selanjutnya, dana sumbangan dari orangtua siswa digunakan untuk membiayai kegiatan non akademik dari para peserta didik baru. Acuanannya, rangkaian kegiatan ini tidak terakomodasi ke dalam item dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun BOS Daerah, meliputi kegiatan pengembangan diri siswa melalui olimpiade-olimpiade siswa, seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN). BOS merupakan besaran alokasi dana yang dikeluarkan untuk kegiatan akademik sekolah.

Secara khusus, pembiayaan operasional Komite Sekolah digunakan untuk kebutuhan administrasi/alat tulis kantor, konsumsi rapat pengurus, transportasi dalam rangka melaksanakan tugas, dan/atau, kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan. Transparansi

pengelolaan biaya pendidikan ditunjukkan melalui laporan berkala oleh Komite Sekolah. Komite ini wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan Kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit sekali dalam satu semester. Laporan tersebut terdiri dari laporan kegiatan Komite Sekolah, dan laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

Yang tak diperbolehkan adalah penggalangan dana berbentuk pungutan di tiap-tiap satuan pendidikan, khususnya saat kegiatan PPDB. Pungutan merupakan penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Menurut Anwar, Pengelolaan pembiayaan pendidikan sama dengan manajemen pembiayaan, dan pengelolaan mempunyai tiga fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu perencanaan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan evaluasi pembiayaan pendidikan.

a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang diarahkan untuk tercapainya tujuan- tujuan dengan sarana yang optimal.

Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi- fungsi lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan.

Langkah-langkah dalam perencanaan yaitu Pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang secara tidak efektif. Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.

Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan ini mencakup kegiatan penting yaitu penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Perencanaan keuangan sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah. Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah/sekolah. Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah

disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

Evaluasi pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Proses melakukan evaluasi mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang dianut, ada bermacam-macam cara. Namun evaluasi harus memasukkan ketentuan dan tindakan sejalan dengan fungsi evaluasi, yaitu: Memfokuskan evaluasi, Mendesain evaluasi, Mengumpulkan informasi, Menganalisis informasi, dan Melaporkan hasil evaluasi

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning. Memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Evaluasi pada administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan.

Mengamati tingkat efektivitas maksudnya menilai tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti direncanakan atau sekurang-kurangnya, apakah kegiatan itu telah berjalan di atas rel yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari perencanaan atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan mengamati tingkat efisiensi maksudnya menilai tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau paling tidak untuk mencapai hasil yang sebesar besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya, yang berarti apakah cara kerja tertentu yang sudah dipergunakan mampu memberi hasil yang maksimal

Biaya pendidikan berfungsi melancarkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan biaya yang memadai sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan dengan sedikit dana dapat berlangsung, tetapi pendidikan yang bermutu membutuhkan dana yang cukup besar. Apabila dukungan pendanaan pendidikan berkurang, maka mutu pendidikan juga akan berkurang. Komponen pokok manajemen keuangan, menurut Reboresse terdiri atas: (1) prosedur penganggaran; (2) prosedur akuntansi keuangan; (3) pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian; (4) prosedur

investasi; dan (5) prosedur pemeriksaan. Hal yang terpenting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana agar dana dapat dimanfaatkan secara efisien, dialokasikan dengan tepat sesuai dengan skala prioritas dan dapat mendukung semua penyelenggaraan proses pendidikan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.

Anggaran merupakan salah satu alat bantu manajemen, artinya bahwa anggaran adalah rencana atau penentuan terlebih dahulu seluruh kegiatan organisasi di waktu yang akan datang yang dinyatakan dalam unit moneter. Penganggaran Biaya Pendidikan di Sekolah Dalam manajemen, perencanaan mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan langkah awal suatu kegiatan, yang antara lain: penciptaan, penyusunan program, perumusan proyek, mempelajari masa yang akan datang, dan penyusunan rencana kerja. Penyusunan anggaran sangat penting dilakukan, karena sangat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan yang akan berdampak pada penghematan sumber daya yang biasanya terbuka, baik dalam dana maupun sarana dan prasarana sehingga

berbagai bentuk pemborosan dan pemubaziran dapat dihindari. Upaya ini memerlukan komitmen yang kuat terhadap kebijakan dan program yang lebih terarah pada sasaran dan kegiatan yang tinggi prioritasnya (priority targeting), yang diukur berdasarkan dampaknya langsung terhadap mutu dan pemerataan pendidikan.

Di dalam rencana anggaran harus memuat data atau informasi yang berkenaan dengan: (1) Informasi rencana kegiatan: sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggung jawab, rencana baru atau lanjutan; (2) uraian kegiatan program: program kerja, rincian program; (3) Informasi kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan; (4) Data kebutuhan: harga satuan, jumlah biaya yang diperlukan untuk seluruh volume kebutuhan; (5) Jumlah anggaran; jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan periode terkait (6) Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program. (Dirjen Dikdasmen, 2002: 42)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 menyebutkan bahwa Pengelolaan dana pendidikan dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Adapun unsur-unsur utama pengelolaan keuangan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) unsur berkala dan unsur hukum (2) unsur luar dan

dalam. Untuk menggali sumber-sumber biaya pendidikan, menurut Zymelman dapat digunakan metode antara lain: pajak, pembayaran bea, sumbangan-sumbangan filantropis, hibah, disposisi kekayaan umum, pemanfaatan keuntungan perusahaan swasta, dan bea-cukai. Metode lain yang kemampuan menghasilkannya terbatas misalnya: penjualan saham, undian, sumbangan dana khusus, langganan, denda, bea perizinan, ganti rugi, dan sebagainya.

Tahap evaluasi anggaran dimaksudkan untuk melihat efektivitas anggaran dalam membiayai berbagai kegiatan dan aktiva yang ada. Evaluasi bukan dimaksudkan untuk menemukan gagasan baru atau mekanisme keuangan, tetapi untuk menganalisis hasil dan melakukan perbaikan gagasan pada periode berikutnya, terutama yang berkenaan dengan siswa, program pengajaran, dan personalia.

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut: (1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (3) Menampung dan

menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat (4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. (5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan (6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha

melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Penelitian kualitatif menurut Suharsimi Arikunto adalah penelitian *naturalistic*. Istilah “*naturalistic*” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada penelitian secara alami. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena peneliti mengadakan penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala dan juga keadaan. Pengambilan data atau penjarangan fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya ini dikenal dengan sebutan “pengambilan data secara alami atau natural.

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami, pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan penjelasan secara utuh dan terperinci tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian penulis. Sebagaimana diungkapkan Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Lokasi peneliti yang dijadikan obyek kajian dalam penyusunan penelitian ini adalah di MAN 1 PADANG. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik

individu atau perseorangan seperti hasil wawancara, sedang data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak pengumpul lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu: Kepala MAN 1 PADANG, Pengurus komite sekolah di MAN 1 PADANG yang terdiri dari: ketua, sekretaris dan bendahara, guru pendidikan di MAN 1 PADANG, serta orang tua siswa. Sedangkan yang dijadikan data sekunder adalah dokumen-dokumen atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian, seperti internet, majalah, buku-buku yang

bersangkutan dengan dukungan komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan.

Metode pengumpulan data menggunakan lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya pengolahan data dilakukan melalui tahap reduksi (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).

Hasil Penelitian & Pembahasan

1. Komite Sekolah Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) Pelaksanaan Program Pembiayaan Di MAN 1 PADANG

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, dapat dikemukakan bahwa bentuk dukungan dari masyarakat dan orang tua siswa selalu adanya partisipasi yang meliputi pemberian dana di MAN 1 PADANG dari orang tua siswa dalam pengembangan sekolah menuju pendidikan yang lebih maju dari sebelumnya. Dukungan dalam bentuk dana tentunya sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat, orang tua, pengurus komite serta dari sekolah itu sendiri yang meliputi sumbangan dalam bentuk uang. Misalnya dalam bentuk sumbangan uang berupa sumbangan awal masuk tahun ajaran baru serta iuran bagi siswa yang lama, hal ini dapat terlihat dari upaya komite sekolah dengan cara memberikan dorongan untuk mempertinggi komitmen orang tua untuk perkembangan sekolah, peningkatan mutu pendidikan dan menjalin kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat maupun orang tua siswa. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu guru lainnya menjelaskan: Bahwa bentuk partisipasi dari orang tua siswa maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah sangat tinggi, ini menandakan bahwa ada respon dari wali murid maupun masyarakat mengenai program yang dibuat oleh sekolah dengan komite sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketua komite sekolah bahwa dalam pengadaan komite sekolah ada juga kendala yang dihadapi sekolah yaitu berupa pengadaan komite sekolah yang tidak mencapai 100%, dikarenakan pendapatan orang tua yang berbeda-beda. Selanjutnya hasil wawancara dari Kepala Sekolah MAN 1 PADANG menjelaskan: Kendala yang dihadapi dalam pengadaan komite sekolah dari orang tua siswa

adalah keberadaan ekonomi dari masing-masing orang tua siswa. Pendapatan orang tua siswa di MAN 1 PADANG dapat dikatakan sangatlah berbeda, ada yang orang tuanya pegawai dan ada juga yang orang tuanya hanya Petani. Disinilah yang merupakan kendala dalam pengadaan komite sekolah. Hal ini berarti bahwa tujuan dari pada komite sekolah yang dibebankan pada orang tua harus sesuai dengan kemampuan orang tua siswa maupun masyarakat sekitar yang bersangkutan, agar mereka bersungguh-sungguh ingin membantu pembiayaan dalam pengembangan sekolah tersebut. Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga pengembangan, hal ini dapat didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemukahirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan pembelajaran.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah: dukungan dari komite sekolah dalam pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah sangat besar. Dengan adanya dana yang disumbangkan dari orang tua siswa maka kebutuhan sarana dan prasarana sekolah bisa terpenuhi walaupun belum sepenuhnya.

2. Komite Sekolah Sebagai Pengontrol (*Controlling Agency*) Pelaksanaan Program Pembiayaan Di MAN 1 PADANG

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala MAN 1 PADANG bahwa: komite sekolah sebagai pengontrol bukan saja hanya untuk siswa melainkan pengawasan pada salah satu program yang dibuat sebelumnya. Dan pengawasan yang dilakukan disini bukan hanya dari pihak sekolah akan tetapi dari pihak komite sekolah juga melakukan pengontrolan ataupun pemantauan terhadap apa yang telah dikerjakan oleh sekolah. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama dengan ketua komite sekolah menjelaskan: pengontrolan dalam komite sekolah dilakukan setiap 3-6 bulan ada evaluasi dalam kegiatan sekolah mengenai pendidikan dan juga mengenai pembangunan sekolah. Pengontrol disini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh sekolah maupun pengurus komite tentang

pelaksanaan serta pembiayaan pengadaan dana pembangunan untuk gedung sekolah dan setiap anggaran-anggaran yang direnggut sebelumnya komite memantau pelaksanaan program yang dibuat sejauh mana pencapaian dari pengadaan komite sekolah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua guru maupun staf yang ada di sekolah MAN 1 PADANG bahwa: Pelaksanaan pengawasan untuk komite sekolah disini adalah melalui kunjungan untuk pelaksanaan program, rapat komite sekolah dengan sekolah, kemudian melihat bagaimanakah dukungan guru terhadap komite sekolah, serta melihat apakah pendidikan disekolah itu berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan atau tidak. Kemudian pengawasan dapat dilihat dari proses kerja sama yang baik antara komite sekolah dengan masyarakat mengenai pelaksanaan program. Serta melihat kelancaran partisipasi dari orang tua tentang apa yang telah disepakati sebelumnya dan dengan adanya dukungan komite sekolah sebagai pengontrol ini bisa melihat sampai dimana hasil dari kerjasama antara sekolah dengan masyarakat untuk pengadaan komite sekolah.

Berdasarkan wawancara dari sekretaris komite MAN 1 PADANG menjelaskan bahwa: Pengontrolan dilakukan mulai dari pemasukan dana sampai pada keluaran dana berdasarkan program yang buat oleh sekolah guna kelancaran proses pendidikan yang ada di MAN 1 PADANG. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah melakukan pengontrolan keberadaan dana komite sekolah agar orang tua dan masyarakat mengetahui kondisi dana ataupun keberadaan dana tersebut. Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama dengan wali murid MAN 1 PADANG bahwa: Pada dasarnya wali murid tidak secara langsung atau tidak setiap saat melakukan pengontrolan melainkan hanya sewaktu-waktu untuk mengkoordinir proses pendidikan dan pelaksanaan program dan pengontrolan terhadap keuangan orang tua siswa juga sering melaksanakan hal itu. Namun jika ada suatu permasalahan maka pihak masyarakat langsung melaksanakan musyawarah mengenai permasalahan yang ditemui dalam pengadaan komite sekolah.

3. Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*) Pelaksanaan Program Di MAN 1 PADANG

Komite sekolah dalam memberikan pertimbangan tentang pembiayaan pendidikan merupakan bentuk komite sekolah yang cenderung dilakukan baik dari sekolah, pengurus komite, serta dari orang tua siswa dan masyarakat. Sebagai pemberi pertimbangan komite sekolah berperan dalam melaksanakan program seperti perencanaan sekolah yaitu memberikan

pertimbangan dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, dan memberikan pertimbangan dalam pengadaan dana.

Selanjutnya wawancara dari Ketua Komite Sekolah MAN 1 PADANG menjelaskan; dalam pemberian pertimbangan dilihat dari segi dana, bagaimana pembiayaannya, dari segi apa yang dibutuhkan oleh sekolah, partisipasi orang tua, dan masih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti pembangunan sekolah yang tidak sesuai dengan kondisi dana yang ada. Dalam penyusunan program sekolah, pengurus komite maupun orang tua siswa diikut sertakan karena untuk penyusunan ini membutuhkan masukan serta rekomendasi dari masyarakat maupun komite sekolah. Dengan adanya pertimbangan maka dapat dirasakan bahwa ada topangan dari pihak komite dan juga masyarakat dalam meringankan pembiayaan-pembiayaan yang ada.

Berdasarkan wawancara bersama dengan semua staf guru di MAN 1 PADANG menjelaskan: pemberian pertimbangan dilakukan dengan cara membuat rapat dengan semua elemen yang terlibat. Serta cara melalui konsultasi dan musyawarah bersama dengan orang tua dalam pengadaan dana. Pertimbangan yang diberikan sekolah terhadap komite sekolah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah pemberian masukan dalam pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan oleh sekolah dalam proses pembelajaran. Bentuk dukungan komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam memberikan pertimbangan serta penentuan, pelaksanaan kebijakan pendidikan dan masyarakat sangat diharapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu komite sekolah dan masyarakat memiliki tanggungjawab terhadap kemajuan pendidikan ditingkat satuan pendidikan sehingga menghasilkan keluaran yang mempunyai mutu atau kualitas yang baik.

4. Komite Sekolah Sebagai Penghubung antara Sekolah dengan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program di MAN 1 PADANG

Penghubung antara sekolah dengan masyarakat salah satunya adalah berkomunikasi secara langsung agar terciptanya lingkungan sekolah yang efektif dan efisien. Melakukan hubungan dengan masyarakat baik itu dari berbagai perorangan, kelompok, dan kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pembiayaan pendidikan dan peningkatan pembelajaran yang bermutu.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Sekolah MAN 1 PADANG menjelaskan bahwa: komite disini yaitu menyampaikan segala program komite kepada masyarakat maupun orang tua siswa sekaligus

mensosialisasikan program pembiayaan agar masyarakat lebih memahami tentang dukungan komite dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya hasil wawancara bersama dengan Kepala Sekolah MAN 1 PADANG menjelaskan: dalam memediasi antara sekolah dengan masyarakat tentunya sekolah melaksanakan pertemuan ataupun rapat komite dengan orang tua siswa kemudian sekolah dengan pengurus komite menyampaikan program kepada orang tua dan masyarakat yang dibuat sebelumnya. Kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan orang tua siswa sangat mempengaruhi proses pembiayaan pendidikan anak didik dan pengembangan sekolah. Di MAN 1 PADANG, komite sebagai penghubung merupakan salah satu bentuk kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan bentuk kerjasama antara kedua ini berjalan dengan aktif dan dengan adanya penghubung ini maka sekolah dengan masyarakat lebih akrab dalam bekerjasama untuk membangun sekolah tersebut dan ini ada timbal balik keduanya karena itu bisa dilihat dari segi lulusan yang sudah berhasil memenuhi standar lulusan.

Mediator/penghubung antara sekolah dengan masyarakat merupakan kesatuan untuk bekerja sama dalam meningkatkan jenjang pendidikan pada suatu sekolah yang ada. Hal ini diharapkan agar supaya sekolah dapat memiliki tujuan antara lain dapat memberikan informasi tentang tujuan program serta kebutuhan sekolah kepada masyarakat.

Hasil wawancara bersama dengan Bendahara Komite Sekolah
MAN

1 PADANG bahwa: Strategi yang digunakan dalam mediator yaitu mengunjungi masyarakat yang dikatakan mampu atau berhasil untuk memberikan motivasi pada sekolah dalam pengembangan sekolah-sekolah

serta memberikan dorongan pada anak dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 PADANG

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh gambaran yang jelas bahwa: Pelaksanaan rapat komite sekolah dilaksanakan di MAN 1 PADANG secara bertahap. Serta selalu menjadi jembatan atau menjembatani antara sekolah dengan masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Melalui dukungan komite sekolah yang tinggi pelaksanaan suatu hubungan dapat mencapai maksud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak sekolah dengan masyarakat, dengan ketentuan bahwa pengurus komite sekolah dibentuk setelah program sekolah dibuat sebelumnya, sehingga sehingga dalam pembiayaan-pembiayaan pendidikan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan MAN 1 PADANG dapat berjalan dengan efektif.

Penutup

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini. Pertama, pembiayaan pendidikan di MAN 1 PADANG dikatakan cukup baik, itu dapat dilihat dari segi input, proses, dan outputnya. Kedua, dukungan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 PADANG, meliputi: 1) sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam rancangan pembiayaan ataupun pengadaan dana: Komite MAN 1 PADANG sebagai mitra kerja kepala sekolah telah memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang telah disusun oleh sekolah. 2) sebagai pendukung (supporting agency) komite sekolah sebagai badan pendukung bagi upaya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan di MAN 1 PADANG, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Misalnya, komite ikut membantu dan menunjang sarana dan prasarana sekolah. 3) sebagai pengontrol (controlling agency) komite sekolah di MAN 1 PADANG melakukan kontrol atau pengawasan pengambilan keputusan kepala sekolah atau perencanaan pendidikan di sekolah khususnya dalam program pembiayaan pendidikan. 4) sebagai mediator (executive) komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah orang tua dan masyarakat dalam upaya meringankan pembiayaan-pembiayaan atau pengadaan dana terkait peningkatan mutu pendidikan di MAN 1 PADANG.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisah. “*Peranan Komite Sekolah dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabung Talun Blitar*”. Penelitian, Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2007.
- Anwar, M. *Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan*. Mimbar Pendidikan, 1999.
- Alcaro, Jerome S. *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip dan TataLangkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Dedi Supriadi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid II. Yogyakarta: Andi Offset, 1981.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan*: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong. Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Di Sekolah Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mulyasa, E. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik,dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.
- Rohiat, 2008. *Manajemen Sekolah; Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Roziqi, Abdul Rofiq. “*Strategi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan*.” Penelitian, Fakultas Tarbiyah dan UIN Malang, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sukmadinata, Nana Syaodih. Dkk. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen*. Bandung:

Refika Aditama, 2006.

Suryadi. Ace. *Indikator Mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Depdikbud, 1992.